



Abstract

The Code River in Yogyakarta is facing significant environmental degradation due to domestic wastewater mismanagement, resulting in increased pollution levels. This research evaluates the effectiveness of the DIY Regional Regulation No. 2 of 2013 in addressing this issue by analyzing the policy's effectiveness and its impact on water quality. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with stakeholders and local community members, alongside secondary sources such as government reports. The study adopts the "Five Rights" framework by Nugroho to assess policy effectiveness, including Right Policy, Right Implementation, Right Target, Right Environment, and Right Process. Findings reveal that while the policy was well-designed to tackle wastewater issues, its implementation has been hampered by community resistance, limited resources, poor maintenance of wastewater treatment facilities (IPAL), and inadequate public awareness campaigns. As a result, pollution in the Code River remains high, with indicators such as fecal coliform bacteria and other pollutants exceeding acceptable levels. This study highlights the need for enhanced public education, better resource allocation, stricter enforcement of regulations, and improved collaboration among stakeholders to achieve sustainable river management. The insights from this research are expected to guide future policies for urban environmental protection.

Abstrak

Sungai Code di Yogyakarta menghadapi degradasi lingkungan yang signifikan akibat kesalahan pengelolaan air limbah domestik, yang mengakibatkan peningkatan tingkat pencemaran. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2013 dalam mengatasi masalah ini dengan menganalisis efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap kualitas air. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan dan anggota masyarakat setempat, di samping sumber-sumber sekunder seperti laporan pemerintah. Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja "Lima Hak" oleh Nugroho untuk menilai efektivitas kebijakan, termasuk Kebijakan Tepat,



Implementasi Tepat, Sasaran Tepat, Lingkungan Tepat, dan Proses Tepat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dirancang dengan baik untuk mengatasi masalah air limbah, implementasinya terhambat oleh penolakan masyarakat, keterbatasan sumber daya, buruknya pemeliharaan fasilitas pengolahan air limbah (IPAL), dan kurangnya kampanye kesadaran publik. Akibatnya, pencemaran di Sungai Code tetap tinggi, dengan indikator seperti bakteri koliform tinja dan polutan lainnya melebihi tingkat yang dapat diterima. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan pendidikan publik, alokasi sumber daya yang lebih baik, penegakan peraturan yang lebih ketat, dan peningkatan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Wawasan dari penelitian ini diharapkan dapat memandu kebijakan masa depan untuk perlindungan lingkungan perkotaan.